

ANALISIS PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011-2016

Dimas Omy Setya Putra
135020201111081
dimasomysetya@gmail.com

Dosen Pembimbing:
Dr. Siti Aisjah, SE., MS., CSRS., CFP
aisjah@ub.ac.id; aisjahsiti@gmail.com

Jurusan Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi pembangunan memiliki hubungan timbal balik yang positif dengan investasi. Semakin banyak investasi suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut semakin baik. Para investor harus memahami potensi investasi di suatu daerah dalam melakukan investasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi periode 2011-2016. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan realisasi investasi sektor di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2011-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Banyuwangi memiliki perkembangan investasi yang sangat baik dan memiliki potensi yang sangat besar. Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh diadakannya even tahunan yang mengangkat potensi dari setiap sektor di Kabupaten Banyuwangi. Luasnya lahan di Kabupaten Banyuwangi dan baiknya performa dari sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu penyebab naiknya investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: investasi, inflasi, produk domestik regional bruto, suku bunga, Kabupaten Banyuwangi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan harus dilaksanakan di seluruh tanah air untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. (Sasana, 2008).

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang sedang melakukan pembangunan daerah. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya yaitu Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010-2015 tercatat lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,59 %, sedangkan di Jawa Timur sebesar 6,27%. Pertumbuhan ini nampaknya seiring dengan gencarnya promosi

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sektor yang terkait pariwisata juga mengalami kenaikan signifikan salah satunya adalah transportasi dan perdagangan yang pertumbuhannya sebesar 8,42 %. Pertumbuhan juga terjadi di sejumlah sektor ekonomi lainnya, seperti kategori industri pengolahan mencapai sebesar 7,30 % (LAKIP BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi, 2015).

Salah satu komponen yang berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi adalah investasi. Investasi adalah salah satu faktor produksi yang memiliki daya dorong dan daya ungkit yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Kegiatan investasi mampu mengakumulasi modal dan meningkatkan produktivitas. Investasi dapat meningkatkan output dan meningkatkan permintaan input. Pembangunan di bidang ekonomi melalui kegiatan investasi memiliki efek yang besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2015).

Pada dasarnya dalam melakukan investasi tidak hanya memperhatikan potensi investasinya saja tetapi ada pertimbangan lain. Menurut Haryotejo (2012), terdapat tiga indikator yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Ketiga indikator tersebut adalah keamanan kondisi, pelayanan infrastruktur publik, dan akses pembiayaan. Berbeda dengan penelitian Haryotejo, penelitian yang dilakukan Dayanti (2016) menyatakan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, ekspor, dan infrastruktur (pelabuhan dan listrik) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PMA di Indonesia.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam indikator maupun variabel yang dapat mempengaruhi masuknya investasi di suatu negara maupun daerah. Selama tahun 2011-2016, Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat pertumbuhan investasi yang sangat besar. Jika dilihat dari realisasi investasi Kabupaten Banyuwangi, pertumbuhan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Tercatat dalam realisasi investasi Kabupaten Banyuwangi pertumbuhan investasi

pada tahun 2011 sebesar 2 milyar rupiah meningkat pada tahun 2012 menjadi 1 trilyun rupiah dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 sebesar 3 trilyun rupiah. Pertumbuhan tersebut tentunya sangat besar bagi sebuah Kabupaten yang baru melakukan pembangunan daerah. Hal tersebut tentunya sangat menarik untuk dikaji mengenai Analisis Perkembangan Investasi di Kabupaten Banyuwangi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sunariyah (2010), Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Keppres RI No. 22 Tahun 1986, investasi berdasarkan perizinannya dibagi menjadi dua, yakni investasi dengan fasilitas dan investasi non fasilitas. Investasi dengan fasilitas kemudian dibagi kembali menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1 adalah penggunaan daripada kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini dan digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Menurut Keppres RI No. 22 Tahun 1986, investasi atau perusahaan non fasilitas adalah investasi atau perusahaan yang tidak tunduk dan tidak mendapatkan fasilitas berdasarkan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kedua Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2014) penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Data merupakan data realisasi investasi pada periode 2011-2016.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Agung (2012:59), data kuantitatif adalah seluruh data atau informasi yang dikumpulkan dari lapangan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Arikunto (2013:172), data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak kedua, biasanya diperoleh melalui instansi yang bergerak di bidang pengumpulan

data seperti Badan Pusat Statistik dan lain-lain. Data sekunder pada penelitian ini berupa data-data statistik daerah (*existing statistic data*) yang dikumpulkan pada penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh Pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPS Kabupaten Banyuwangi serta Bank Indonesia.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

a. Investasi

Investasi dalam penelitian ini adalah realisasi investasi di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2011-2016 dalam satuan milyar rupiah yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Investasi dengan Fasilitas

Investasi dengan fasilitas dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Dalam Negeri dalam penelitian ini adalah nilai penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri (BUMN maupun swasta) yang berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi dan telah memiliki izin

investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Penanaman Modal Asing dalam penelitian ini adalah nilai penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asing yang berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki izin investasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Investasi Non Fasilitas

Investasi non fasilitas yang dimaksud adalah nilai investasi regional yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi yang meliputi *mini market*, UMKM, toko oleh-oleh dan toko-toko kecil yang telah memiliki izin usaha dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari, menyusun, membandingkan, meneliti, dan mempelajari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif.

4. HASIL PENELITIAN

Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya yaitu Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau Jawa, di kawasan Tapal Kuda, dan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di utara, Selat

keberhasilan Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk mempromosikan Kabupaten Banyuwangi menjadi lahan investasi yang dapat menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2016 terjadi kenaikan dan penurunan yang

Tabel 1 Realisasi Investasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2016

No	Tahun	PMA		PMDN		Investasi Non Fasilitas		Investasi Keseluruhan	
		Nilai Investasi	Jumlah Izin	Nilai Investasi	Jumlah Izin	Nilai Investasi	Jumlah Izin	Nilai Investasi	Jumlah Izin
1	2011	0,96	5	0,80	1	0,35	1.635	2,14	1.641
2	2012	83,04	3	645,24	1	462,32	1.336	1.190,61	1.340
3	2013	0	0	2.450,01	5	937,37	1.981	3.387,38	1.986
4	2014	0	0	2.345,24	5	1.099,67	1.588	3.444,91	1.593
5	2015	6,98	11	299,59	7	1.107,14	1.846	1.413,72	1.864
6	2016	27,89	19	2.288,72	12	792,33	1.976	3.107,94	2.007

Sumber: Dina Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa.

Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2016 mengalami peningkatan sangat pesat. Hal tersebut dikarenakan

dapat dilihat pada Tabel berikut.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Investasi Berdasarkan Nilai Investasi

Jenis Investasi	Mean	Varian	Std. Dev
PMA	19,81	1.073,59	32,76
PMDN	1.338,27	1.300.256,46	1.140,29
Non Fasilitas	733,20	185.951,64	431,22
Investasi Keseluruhan	2.091,12	2.036.117,34	1.426,93

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata PMA di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2016 adalah 19,81 milyar rupiah, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan dana investasi dari investor sebesar 19,81 milyar rupiah. Pada tahun 2012 dan 2016 PMA di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata secara berturut-turut sebesar 83,04 milyar rupiah dan 27,89 milyar rupiah (Tabel 1). Kemudian pada tahun 2011 dan 2015 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut sebesar 0,96 milyar rupiah dan 6,98 milyar rupiah (Tabel 1). Sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai 0 karena pada tahun tersebut tidak ada investor asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi.

Varians dari nilai investasi PMA memiliki nilai sebesar 1.073,592 yang berarti bahwa data pada nilai investasi PMA bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 32,76 yang berarti bahwa nilai investasi PMA di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 32,76 terhadap rata-rata.

Rata-rata PMDN di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016

adalah 1.338,27, yang berarti rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan dana investasi dari investor sebesar 1.338,27 milyar rupiah. Pada tahun 2013, 2014 dan 2016, PMDN di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebesar 2.450,24, 2.345,24 dan 2.288,72 milyar rupiah (Tabel 1). Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2015 memiliki nilai di bawah rata-rata yaitu dengan nilai 0,80, 645,24 dan 299,59 milyar rupiah (Tabel 1).

Varians dari nilai investasi PMDN memiliki nilai sebesar 1.300.256,46 yang berarti data pada nilai investasi PMDN sangat bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 1.140,29 yang berarti bahwa nilai investasi PMDN di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 1.140,29 terhadap rata-rata.

Rata-rata Investasi no fasilitas pada Tabel 2 selama tahun 2011-2016 menunjukkan nilai sebesar 733,20 milyar rupiah, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 Kabupaten Banyuwangi mendapatkan dana investasi dari investor sebesar 733,20 milyar rupiah. Pada tahun 2013-2016,

investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata secara berturut-turut sebesar 937,37, 1.099,67, 1.107,14, dan 792,33 milyar rupiah (Tabel 1). Sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut yaitu 0,35 dan 462,32 milyar rupiah (Tabel 1).

Varians dari nilai investasi non fasilitas memiliki nilai sebesar 185.951,64 yang berarti data pada nilai investasi non fasilitas sangat bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 431,22 yang berarti bahwa nilai investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 431,22 terhadap rata-rata.

Tabel 3 Analisis Investasi Berdasarkan Jumlah Izin Investasi

Jenis Investasi	Mean	Varian	Std. Dev
PMA	6,33	55,07	7,42
PMDN	5,17	16,97	4,12
Non Fasilitas	1.727	64.268,8	253,51
Keseluruhan	1.738,5	67.715,5	260.22

Sumber: Data Olahan

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah izin usaha PMA di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah 6,33

unit usaha, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 6 unit usaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah izin usaha PMA di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebesar 11 dan 19 unit usaha (Tabel 1). Sedangkan pada tahun 2011-2014 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut yaitu dengan nilai 5, 3, 0, dan 0 unit usaha (Tabel 1).

Varians dari jumlah izin usaha PMA memiliki nilai sebesar 55,07 yang berarti data pada jumlah izin PMA juga bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 7,42 yang berarti bahwa jumlah izin usaha PMA di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 7,42 terhadap rata-rata.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah izin usaha PMDN di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah 5,17 unit usaha, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 5 unit usaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2015 dan 2016 jumlah izin usaha PMDN di

Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai di atas rata-rata yaitu sebesar 7 dan 12 unit usaha (Tabel 1). Sedangkan pada tahun 2011-2014 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut dengan nilai 1, 1, 5, dan 5 unit usaha. Jumlah izin usaha PMDN terendah terdapat pada tahun 2011 dan 2012 dengan nilai 1 unit usaha sedangkan yang tertinggi berada pada tahun 2016 sebesar 12 unit usaha.

Varians dari jumlah izin usaha PMDN memiliki nilai sebesar 16,97 yang berarti data pada nilai investasi PMDN juga bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 4,12 yang berarti bahwa jumlah izin usaha PMDN di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 4,12 terhadap rata-rata.

Pada Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah izin usaha investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2011-2016 adalah 1.727 unit usaha, artinya rata-rata dalam jangka waktu 2011-2016 terdapat 1.727 unit usaha yang menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2013, 2015, dan 2016 jumlah izin usaha investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai

di atas rata-rata secara berturut-turut sebesar 1.981, 1.846, dan 1.976 unit usaha (Tabel 4.5). Sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2014 memiliki nilai di bawah rata-rata secara berturut-turut sebesar 1.635, 1.336, dan 1.588.

Varians dari jumlah izin usaha investasi non fasilitas memiliki nilai sebesar 64.268,8 yang berarti data pada nilai investasi non fasilitas juga bervariasi. Sedangkan standar deviasi memiliki nilai sebesar 253,51 yang berarti bahwa jumlah izin usaha investasi non fasilitas di Kabupaten Banyuwangi memiliki perbedaan sebesar 253,51 terhadap rata-rata.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa investasi di Kabupaten Banyuwangi memiliki perkembangan yang cukup baik. PMDN memiliki kontribusi tertinggi dalam perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing memiliki kontribusi paling rendah terhadap perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penanaman modal asing, aspek yang

perlu dipertimbangkan oleh investor untuk menanamkan modalnya lebih kompleks. Menurut Bodie, Kane dan Marcus (2014), dalam melakukan investasi, seorang investor perlu melakukan analisis fundamental ekonomi makro. Indikator ekonomi yang dimaksud adalah PDRB, ketenagakerjaan, inflasi, suku bunga, defisit anggaran dan sentimen. Hasil penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Dayanti (2016) tentang studi empiris investasi di Indonesia yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Ekspor, Infrastruktur Listrik dan Pelabuhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanaman modal di Indonesia terutama pada penanaman modal asing. Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa indikator ekonomi makro dapat menentukan masuknya investasi di suatu negara maupun di daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi.

Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri memiliki kontribusi paling besar dalam peningkatan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan

analisis data menunjukkan bahwa pertumbuhan PMDN berbanding terbalik dengan pertumbuhan PMA. Pada tahun 2013 dan 2014 PMA memiliki nilai rendah hingga mencapai nilai 0 (nol). Akan tetapi, PMDN justru memiliki nilai tinggi pada tahun 2013.

Tingginya PMDN disebabkan oleh Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebagai contoh adalah kandungan emas yang ada di gunung tumpang pitu. Saat ini tambang emas tersebut diolah oleh PT Bumi Suksesindo (BSI), anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. Selain itu, hasil pertanian di Kabupaten Banyuwangi juga memiliki kualitas yang cukup baik sehingga menarik perusahaan besar seperti PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PTPN XI, dan PTPN XII. PG Glenmore yang telah membangun pabrik gula terbesar di Indonesia.

Investasi Non Fasilitas

Investasi non fasilitas memiliki pergerakan yang cenderung stabil di tengah pergerakan fluktuatif dari PMA dan PMDN. Pada Tabel 4.2 diketahui bahwa nilai investasi non fasilitas

selalu meningkat dan memiliki nilai yang cukup besar. Selain itu, apabila ditinjau dari jumlah investor yang berinvestasi juga memiliki angka yang cukup stabil.

Berdasarkan Keppres RI No. 22 Tahun 1986, investasi non fasilitas adalah investasi atau perusahaan yang tidak tunduk dan tidak mendapatkan fasilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Artinya, investasi non fasilitas tidak terikat pada UU no. 25 tahun 2007. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2017), bentuk dari investasi non fasilitas adalah UMKM, *mini market*, toko oleh-oleh dan toko kecil lainnya yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan terhadap

krisis ekonomi. Hal demikian dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: 1) tidak memiliki utang luar negeri, 2) tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*, 3) menggunakan input lokal dan 4) berorientasi pada ekspor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Investasi di Kabupaten Banyuwangi memiliki perkembangan yang sangat baik dan memiliki potensi yang sangat besar. Perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh diadakannya even tahunan yang mengangkat potensi dari setiap sektor di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, luasnya lahan di Kabupaten Banyuwangi dan baiknya perform dari sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi juga menjadi salah satu penyebab naiknya investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus lebih fokus pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan

dan pariwisata untuk bisa mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Banyuwangi.

2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebaiknya menambah jumlah even yang bertaraf internasional dan membawa potensi lain pada even tersebut. Sehingga akan lebih banyak lagi potensi yang dapat diperkenalkan pada dunia internasional dan akan mendorong masuknya investasi.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus dapat memberikan kebijakan yang dapat mempermudah investor dalam berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, W. 2010. *Panduan SSPS Untuk Mengolah Penelitian Kuantitatif*. Jogjakarta: Garailmu

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 2014. *Incremental Capital*

Output Ratio (Icor) Kabupaten Banyuwangi. Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dayanti, Niken Dwi. 2016. *Studi Empiris Tentang Penanaman Modal Asing Langsung Di Indonesia*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang, Jawa Timur.

Haryotejo, Bagas. 2012. *Analisis Iklim Investasi Daerah (Studi Kasus: Kota Semarang)*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. Jakarta.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2016. *Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015*. Pemerintah Kabupaten

- Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Timur.
- Republik Indonesia. 1970. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1970. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1986. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 1986. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1986 tentang Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sasana, Hadi. 2008. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang, Jawa Tengah
- Sunariyah. 2010. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, edisi ke 6*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.